

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kondisi keamanan, kestabilan ekonomi dan politik serta iklim sosial suatu bangsa yang kondusif, akan membawa dampak yang positif pula bagi berbagai aktifitas di negara tersebut. Tanpa adanya iklim sosial, kestabilan ekonomi dan politik serta kondisi keamanan yang kondusif maka segala aktifitas pemerintahan maupun non pemerintahan akan mengalami berbagai kendala dan hambatan, sehingga tidak akan berjalan dengan baik.

Gempa bumi dan gelombang tsunami di Samudra Hindia adalah merupakan musibah dan tragedi kemanusiaan yang besar yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, meski gelombang ini juga melanda beberapa negara sekitar, seperti India, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Maladewa, Somalia, Bangladesh, dan Kenya, namun jumlah korban terbanyak dari berbagai negara tersebut diderita oleh Indonesia, dimana tercatat dalam data Departemen Kesehatan, jumlah korban meninggal akibat gempa dan badai tsunami di Provinsi NAD diperkirakan sekitar 173.741 jiwa dan di Sumut 240 jiwa. Tsunami tidak hanya merengut jiwa tetapi juga harta benda dan menimbulkan beberapa permasalahan seiring dengan terhentinya seluruh aktivitas di propinsi NAD.

Gelombang tsunami telah meninggalkan banyak permasalahan di NAD yang harus segera ditangani, mulai dari masalah luluh lantahnya sarana fisik hingga masalah sandang, papan, pangan, obat-obatan dan kesehatan psikologis bagi para korban bencana tsunami. Dampak yang ditinggalkan oleh bencana ini pun tidak sedikit, mulai dari dampak ekonomi, sosial, kesehatan fisik dan mental, kehidupan anak-anak yang terlantar, pendidikan yang terancam keberlangsungannya, sampai kekawatiran bencana hutang setelah tsunami berlalu, karena diketahui sebagian dari bantuan untuk NAD adalah berupa pinjaman berjangka.

Banyaknya korban yang meninggal akibat bencana tsunami, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia, baik perempuan maupun laki-laki serta dampak yang ditinggalkannya. Telah membawa tsunami sebagai isu kemanusiaan nomor satu yang berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Bencana tsunami telah menyebabkan ketakutan, kekalutan dan kekhawatiran bagi rakyat Aceh khususnya dan mengancam keamanan manusia di Indonesia pada umumnya.

Bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang meluluh lantakan Aceh, dipandang bukan hanya sebagai masalah domestik semata, akan tetapi hal tersebut juga telah menjadi permasalahan dunia Internasional. Pasca bencana tsunami, banyak mengalir bantuan dari Negara asing yang turut berduka atas peristiwa tersebut. Diantara Negara donatur tersebut adalah Amerika Serikat yang memiliki andil cukup besar dalam rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Besarnya bantuan dan perhatian yang di berikan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam membantu rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh itulah yang menarik penulis untuk mengetahui lebih lanjut dan

menuangkan pengetahuan penulis kedalam sebuah rumusan yang tercantum dalam sebuah judul **“Peran Amerika Dalam Membantu Korban Bencana Tsunami di Aceh”**.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Menjawab pokok permasalahan tentang peran Amerika dalam upayanya membantu dan memulihkan kondisi NAD pasca bencana tsunami.
2. Menambah wacana keilmuan penulis.
3. Belum adanya penulis lain yang menulis skripsi tentang tema diatas, baik di UMY, UGM maupun di UPN.

C. Latar Belakang Masalah

Gempa tektonik berkekuatan 8,9 Skala Richter yang berpusat di 149 km sebelah selatan Meulaboh, Aceh Barat, Minggu 26 Desember 2004 pukul 7.58 WIB dan disusul gempa kedua bekekuatan 5,9 Skala Richter pada pukul 8.48 WIB, telah mengakibatkan tsunami setinggi 10 meter. Gelombang tsunami yang melanda sebagian kawasan Nanggroe Aceh Darussalam itu pun merenggut korban hingga 173.981 jiwa (173.741 jiwa di NAD dan 240 di Sumut) dimana 89.832 diantaranya telah di makamkan dan sekitar 108.083 orang harus kehilangan tempat tinggalnya, dimana dirincikan dari kabupaten Bireun 41.783 jiwa, kota Langsa 2.680 jiwa,

kabupaten Aceh Utara 50.020, dan kabupaten Aceh Timur 13.600. Bahkan, besarnya kekuatan gempa telah menyebabkan gelombang tsunami juga menerjang pantai-pantai India, Sri Lanka, Malaysia, Maladewa, Bangladesh, dan Thailand dengan total korban 23.000 nyawa.¹

Sesaat pasca bencana gempa bumi tektonik dan gelombang tsunami menyapu daerah-daerah di provinsi NAD, yang tertinggal hanyalah berupa puing-puing dan tubuh-tubuh jenazah korban gempa dan tsunami tersebut, sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Menyusul lumpuhnya berbagai aktivitas ekonomi, transportasi dan telekomunikasi di propinsi NAD, masalah-masalah barupun timbul dan menuntut suatu penyelesaian bersama, baik dari kalangan masyarakat domestik maupun Internasional. Masalah tsunami ini pun telah menjadi satu isu sentral Internasional dalam beberapa tahun tahun terakhir ini.

Gempa dan tsunami, 26 Desember 2004 selain merengut ratusan korban juga telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur, pemukiman, sarana sosial seperti gedung sekolah, ekonomi dan lain-lain. Sektor ekonomi adalah termasuk sektor yang paling parah terkena imbas tsunami, Imbas kerusakan itu terlihat pada bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan serta ketenagakerjaan. Perekonomian masyarakat lumpuh total dan butuh beberapa tahun untuk memulihkannya dan menjadikannya seperti semula.

¹ Data Departemen Kesehatan pada pukul 08.24 tanggal 23 Januari 2005.

Sebelum adanya bencana tsunami 26 Desember, Perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi lokal di Nangroe Aceh Darusalam, dimana sektor ekonomi ini telah menyumbangkan 6,5 persen dari pendapatan Daerah Bruto (PDB) senilai dengan 1,59 triliun pada tahun 2004.²

Namun pasca terjangan gelombang tsunami 26 Desember 2004 kemarin, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2005) memperkirakan 9563 unit perahu hancur atau tenggelam, termasuk 3969 (41,5%) perahu tanpa motor, 2369 (24,8%) perahu bermotor dan 3225 (33,7%) kapal motor besar (5-50 ton). Selain itu, 38 unit tempat pelelangan ikan (TPI) rusak berat dan 14.523 hektar tambak di 11 kabupaten/kota rusak berat. Diperkirakan total kerugian langsung akibat bencana tsunami mencapai Rp 944.492,00 (50% dari nilai total aset), sedangkan total nilai kerugian tak langsung mencapai Rp 3,8 milyar. Sebagian besar kerugian berasal dari kerusakan tambak.

Kehidupan para nelayan di tanah rencong pun sempat tidak terdengar geliatnya, karena sebagian nelayan tewas dan hilang. Dari 400 ribu nelayan yang mendiami pesisir kini tinggal 200 ribu nelayan saja yang kembali melaut.

Imbas kerusakan akibat tsunami juga terlihat pada bidang industri kecil dan menengah, dimana tingkat kerusakannya mencapai 65%, Kerusakan parah juga

² Dinas Perikanan dan Kelautan NAD 2005.

terjadi dalam bidang pertanian dan kehutanan, dimana 23.330 ha sawah dan 22.785 ha lahan tegalan rusak total.³

Selain berbagai kerusakan dalam sektor ekonomi, sektor pendidikan juga mengalami kerusakan yang memprihatinkan, dimana lebih dari 1500 bangunan sekolah dan perguruan tinggi hancur dan sekitar 86 ribu peserta didik serta 1800 tenaga pengajar di wilayah Nanggroe Aceh Darusalam meninggal dunia.

Penderitaan masyarakat Aceh rupanya belum usai, mulai dari penderitaan akibat konflik yang berkepanjangan antara GAM dan TNI yang sangat membuat situasi Hak Asasi Manusia di propinsi tersebut menjadi buruk dan membahayakan masyarakat sipil yang rapuh. Status Darurat Militer, yang dilaksanakan dalam bulan Mei 2003, terus berlanjut sampai bulan Mei 2004, selanjutnya Pemerintah Indonesia memberlakukan status Darurat Sipil. Dimana pertempuran antara GAM dan TNI terus berlanjut tanpa mereda selama keadaan Darurat Sipil tersebut, sebagaimana juga pembatasan terhadap kebebasan sipil di Aceh. Kemudian diperkirakan lebih dari seperempat juta orang Aceh telah meninggal di dalam gempa bumi dan tsunami yang melanda propinsi tersebut pada tanggal 26 Desember 2004. Oleh karena adanya kehancuran yang begitu besar dan penderitaan manusia, maka GAM kemudian menyatakan suatu gencatan senjata dan Pemerintah membuka daerah-daerah yang terkena tsunami di Aceh kepada para pekerja kemanusiaan dan wartawan internasional.

³ Al Mubarak Taufik, *Majalah Nanggroe: Ekonomi Aceh Pasca Tsunami*, Edisi November 2005.

Akibat penderitaan yang besar dan kerusakan serta jumlah korban di provinsi Nangroe Aceh Darusalam tersebut, Simpati dari masyarakat Internasional pun datang yang diikuti dengan pemberian bantuan baik dalam bentuk dana, obat-obatan, tim medis, makanan, transportasi dan lain-lain. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Australia, Arab Saudi, Mesir, Libya, Pakistan, Myanmar, Denmark, Prancis, Qatar, Korea Utara, Inggris, Taiwan, RRC, Korea Selatan, Timor Leste, Tunisia, Turki, Venezuela, Yordania, Yunani, Austria, Al-Jazair, Belanda, Belgia, Brunei Darussalam, Ceko, Chile, Italia, Jerman, Kamboja, Kuwait, Iran, India, Latvia Lituania, Estonia, Filipina, Finlandia, Hongaria, Spanyol, Selandia Baru, Irlandia, Swedia, Swiss, Siprus, Syiria, Slovakia, Slovenia, Luksemburk, Malta, Maroko, Norwegia, Portugal, Polandia, Rusia, Thailand.

Salah satu negara donatur terbesar bagi bencana gempa dan tsunami Aceh adalah Amerika Serikat, Amerika yang dikenal sebagai negara adi daya ini menyumbangkan US \$ 400.000.000, untuk korban tsunami di NAD, keseriusan pemerintah Amerika dalam membantu korban bencana dan tsunami Aceh ditunjukkan dengan memberikan berbagai bantuan, baik itu bantuan teknis berupa pengiriman tenaga militer atau personel yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, ahli medis, dan perawat, bantuan hibah berupa pemberian dana rehabilitasi dan rekontruksi Aceh atau berupa bahan makanan dan obat-obatan, serta bantuan pinjaman pembangunan berupa pinjaman lunak.

Perhatian serta bantuan yang diberikan pemerintah Amerika Serikat ini, bukanlah yang pertama bagi Indonesia. Sebelumnya pemerintah AS juga telah

memberikan banyak bantuan bagi terciptanya pembangunan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui kerjasama pembangunan yang telah berjalan selama 36 tahun. Sudah sejak tahun 1967, Amerika Serikat memberikan bantuan pembangunan bagi Indonesia dimana kebijakan kerjasama pembangunan Indonesia-Amerika Serikat ini berlandaskan pada empat bidang strategi utama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga lingkungan hidup, stabilitas pertumbuhan penduduk dan kesehatan, serta pembangunan demokrasi. Melalui kerjasama pembangunan ini Amerika Serikat telah membantu terwujudnya berbagai proyek kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup, telekomunikasi, industri, perhubungan, listrik, komoditi, serta fasilitas pendidikan di Indonesia.⁴

Kini ketika Indonesia dilanda musibah gempa dan tsunami, Amerika Serikat pun menunjukkan perhatiannya dengan mengucurkan dana \$ 400 juta untuk Aceh. Bahkan tidak tanggung-tanggung, untuk menunjukkan keseriusannya, Presiden Bush menunjuk dua pendahulunya, yakni mantan Presiden Bush Senior dan Bill Clinton, untuk memimpin penggalangan dana bantuan secara nasional. Presiden AS ini juga mengutus Colin Powell dan Jeb Bush untuk datang langsung ke wilayah-wilayah yang terkena bencana, khususnya Aceh. Powell diutus dalam kedudukannya sebagai menteri luar negeri, sedangkan adik sang presiden, Jeb Bush, disertakan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Florida yang berpengalaman dalam membangun kembali wilayahnya yang sering diporakporandakan angin topan. Singkat kata, pada

⁴ "Kerjasama Pembangunan Indonesia-Amerika Serikat",
<http://www.bappenas.go.id/index.php>.

tingkat pemerintah maupun masyarakat, Amerika Serikat telah menunjukkan simpati dan komitmennya untuk secara serius membantu para korban bencana tsunami di NAD.⁵

Seperti telah diungkapkan oleh Duta Besar Amerika, Lyn Pascoe, di Kedubes AS, Kamis 13 Januari 2005, bahwa seluruh bantuan hibah yang diberikan oleh pemerintah Amerika tersebut adalah demi komitmen mereka untuk peduli terhadap peristiwa di Nanggroe Aceh Darusalam, bantuan Amerika Serikat tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, sambil juga membantu demokrasi dan stabilitas Indonesia yang timbul pada suatu titik waktu yang kritis akibat berbagai konflik internal.⁶ Dinyatakan pula oleh Sekjen PBB Kofi Annan dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center, Kamis 06 Januari 2005, tentang keberadaan militer Amerika Serikat dan juga Negara lain di Nanggroe Aceh Darusalam yang merupakan daerah konflik, semata-mata hanya untuk misi kemanusiaan dan hanya sepanjang diperlukan untuk proses evakuasi korban di daerah terpencil.⁷

Namun demikian bantuan Amerika kepada Indonesia juga memiliki suatu muatan politik, dimana Amerika ingin menjaga iklim investasinya di Indonesia mengingat Indonesia merupakan lahan investasi bagi Amerika Serikat selama ini. Di mana Amerika Serikat dapat memperoleh bahan-bahan mentah untuk kebutuhan

⁵<http://www.compas.com/05/01/11/opini/1489400.htm>.

⁶<http://www.tempointeraktif.com/2005/01/13/brk,20050113-50,id.html>.

⁷<http://www.tempointeraktif.com/2005/01/06/brk,20050106-24,id.html>

industri di Indonesia sekaligus buruh pekerja yang relatif murah. Selain itu Amerika Serikat juga ingin menunjukkan pengaruhnya secara global dan berusaha membangun kembali kepercayaan dan image positif yang sempat hilang akibat berbagai isu pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam infasinya ke Negara Timur Tengah akhir-akhir ini.

D. Rumusan Masalah

Dari Uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran Amerika dalam membantu dan memulihkan kondisi Aceh pasca tsunami ?

E. Kerangka Pemikiran

Dalam membantu menjelaskan masalah di atas maka dapat digunakan konsep bantuan luar negeri K.J. Holsti sebagai acuan. K.J. Holsti menyatakan, bahwa kebutuhan dan harapan ekonomi dewasa ini sangatlah gawat dan tersebar luas diantara lebih dari 65% penduduk dunia. Pembangunan ekonomi dan industrialisasi merupakan antara lain tujuan utama kebijakan umum di semua negara, tetapi banyak bangsa tidak dapat berharap untuk mencapai tujuan tersebut tanpa bantuan lembaga-lembaga atau negara yang dapat menyediakan modal pembangunan dan keahlian teknologi. Oleh karena itu banyak terdapat program-program bantuan yang diberikan oleh negara donor kepada negara miskin sebagai negara penerima. Program-program bantuan luar negeri ini, dapat memeberikan manfaat secara serentak kepada negara

donor dan negara penerima; Negara penerima menerima uang, pinjaman, bahan dan pengetahuan, yang mereka berharap akan menciptakan perekonomian modern; sedangkan negara donor, tanpa memandang tipe “syarat-syarat” yang mereka lekatkan pada bantuan mereka, biasanya berharap akan menerima dividen politik atau komersial dengan segera atau jangka panjang.⁸

Inggris adalah yang pertama merumuskan kebijakan bantuan luar negeri yang dirancang terutama untuk membantu pembangunan ekonomi jangka panjang. Melalui program pembangunan dan kesejahteraan kolonial yang dimulai pada tahun 1930-an, mereka menganekaragamkan perekonomian jajahan mereka dan mempersiapkannya untuk memperoleh kemerdekaan politik dan ekonomi. Setelah PD II, Amerika Serikat menggantikan Inggris sebagai donor utama bantuan luar negeri, pertama-tama untuk membantu membangun kembali perekonomian Eropa yang hancur karena perang, Amerika mengeluarkan \$12 milyar dalam Program Pemulihan Eropa, dan kemudian untuk membantu negara-negara sedang berkembang untuk membangun kekuatan militer modern dan memulai jalan panjang menuju kelangsungan hidup ekonomi dan industrialisasi. Selain Amerika dan Inggris terdapat pula sejumlah negara donor lain yang memberikan sejumlah bantuan pembangunan mereka kepada negara miskin pada tahun 1980-an, negara donor tersebut adalah Swedia, Perancis, Kanada, Jerman Barat, Jepang, dan Italia. Dewasa ini, hampir semua negara industri di dunia memberikan paling tidak sejumlah kekayaan dan keahlian mereka. Sebagian terbesar

⁸ K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka untuk analisis*, Erlangga, Jakarta, 1988, hal. 245.

program itu merupakan usaha bilateral yang dirundingkan secara langsung antara negara donor dan negara penerima. Kini, hampir semua negara industri di dunia turut serta dalam berbagai program bantuan bilateral dan multilateral, walaupun jumlah seluruhnya telah melampaui angka \$30 milyar setiap tahun, namun jumlah angka tersebut, mengingat inflasi dan kebutuhan negara termiskin, menurut kebanyakan ahli masih jauh dari memadai. Lagi pula, karena arus bantuan bersih tidak mengimbangi kebutuhan atau tuntutan, penggunaan instrumen ekonomi ini untuk mengejar tujuan-tujuan politik menjadi kurang efektif. Karena satu hal, negara-negara donor menyalurkan pinjaman, dana bantuan, dan bantuan teknis atas sejumlah besar negara penerima dan hanya beberapa negara saja yang menerima jumlah bantuan yang besar dari satu sumber.

Dikemukakan oleh K.J. Holsti, dalam bukunya *Politik Internasional: kerangka untuk analisis*, bahwa :

“Bantuan luar negeri – pengiriman uang, barang atau nasihat teknis dari sebuah negara donor kepada penerima merupakan instrumen kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad. Pada masa lampau instrumen itu terutama tidak digunakan untuk kemaslahatan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Pada abad ke delapan belas misalnya, para negarawan telah secara teratur memberikan mitra luar negeri mereka suap uang tunai untuk pelaksanaan jasa

tertentu. Sejumlah pemerintah juga menggunakan bantuan militer dalam bentuk subsidi dan sumbangan manusia dan peralatan militer”.⁹

Bantuan luar negeri adalah semua jenis bantuan yang di berikan oleh negara/lembaga donor baik berupa pinjaman maupun hibah dengan persyaratan tertentu.¹⁰

Ada pun tipe-tipe bantuan luar negeri tersebut, terdapat empat tipe utama program bantuan, yakni:¹¹

1. Bantuan Militer

Bantuan militer ini juga merupakan tipe yang tertua karena bantuan militer merupakan suatu teknik tradisional untuk menunjang persekutuan. Dimana Negara-negara donor menyediakan uang dan peralatan (senjata perang), sedangkan Negara-negara penerima memberikan sebagian besar orang-orang mereka untuk mendapatkan latihan militer yang diperlukan.¹²

2. Bantuan Teknis

Bantuan berupa pengiriman tenaga atau personel yang memiliki keahlian khusus dari negara donor untuk memberikan nasehat mengenai suatu proyek atau menyebarkan pengetahuan dan keahliannya di negara penerima.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ “Peluang dan Prosedur Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri”,
<http://www.dprin.go.id/roren1/bantuan/transparant.pdf>

¹¹ *Ibid.*, K.J. Holsti, hal. 9

¹² Hans Morgentau, “A Political Theory of Foreign Aid,” *The American Political science Review*, 1962. Hal. 303.

3. Bantuan Hibah

Bantuan dengan menyumbangkan pemberian secara ikhlas yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali secara ekonomi.

Secara harfiah bantuan hibah berarti memindahkan barang-barang, uang atau teknologi ke negara lain secara cuma-cuma.¹³

4. Pinjaman Pembangunan

Yaitu berupa pinjaman yang diberikan kepada negara penerima dengan suku bunga yang lebih rendah dari pada yang berlaku dipasaran keuangan internasional.

Mengingat ketergantungan banyak negara sedang berkembang pada negara-negara industri dalam hal modal, nasihat, dan kadang-kadang bantuan militer, memungkinkan bantuan luar negeri ini digunakan sebagai suatu instrumen politik. Asumsi di balik sebagian besar program pembangunan ekonomi Barat adalah bahwa pembangunan ekonomi yang berhasil di negara sedang berkembang akan menciptakan stabilitas politik dan mengurangi ancaman revolusi dan kegoncangan hebat, yang dapat dimanfaatkan oleh Komunis. Adapula yang berasumsi bahwa pembangunan ekonomi akan membantu rejim demokratisasi liberal untuk memperoleh kekuasaan dan mencegah negara penerima mengikuti kebijakan luar negeri yang bersifat petualangan atau sekedar mencoba-coba. Menurut mereka, perekonomian yang sehat akan menghasilkan kebijakan luar negeri yang tenang.

¹³ *Ibid*, Peluang dan Prosedur Pemanfaatan bantuan Luar negeri, hal. 11.

Tema menonjol lain yang digunakan para pemerintah untuk membenarkan program bantuan mereka adalah bahwa pembangunan ekonomi membantu menunjang ketidaktergantungan negara penerima, yang memungkinkan negara penerima meniadakan ketergantungan mereka pada suatu negara atau kelompok negara tertentu. Semakin kuat mereka secara ekonomi dan militer maka semakin kecil rawan mereka terhadap tekanan diplomatik, ekonomi dan lainnya. Dari sudut pandang Amerika khususnya, kehadiran sekelompok negara yang sungguh-sungguh tidak tergantung dianggap mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan keamanan Amerika Serikat. Kehadiran itu mengurangi jumlah komitmen militer yang harus dilakukan Amerika dan juga memperkecil kebutuhan untuk menempatkan lebih banyak pasukan di luar negeri. Dari sudut pandang Perancis dan Inggris, program bantuan luar negeri juga dianggap sebagai suatu komitmen berkesinambungan untuk mempertahankan penguasaan atas bekas jajahan, sebagai suatu cara memperluas kesempatan komersial, dan sebagai suatu metode mempertahankan pengaruh diplomatik tertentu di kawasan yang sebelumnya di bawah kekuasaan eksklusif mereka. Apapun yang menjadi tujuan sebenarnya dari program bantuan, baik itu pembangunan ekonomi atau perbaikan kualitas manusia; program itu dapat digunakan untuk memberi imbalan, mengancam, atau menghukum; artinya, untuk mendapatkan pengaruh atas sikap para penerima dengan cara sedemikian rupa sehingga membantu negara donor mencapai tujuan politik jangka pendek tertentu.

Akhirnya, mungkin sukar untuk berspekulasi tentang semua konsekwensi bantuan program. Pembangunan ekonomi, misalnya, dapat menimbulkan dampak

yang cukup besar pada ciri politik dalam negeri atau nasional. Bantuan Amerika kepada Thailand mempunyai tujuan utama untuk mengintegrasikan kawasan timur laut yang tertimpa kemiskinan dan terasing dari bagian lain negara itu. Program bantuan telah membantu membiayai pembuatan ratusan mil jalan yang tahan segala cuaca di daerah itu. Program ini mempunyai dampak ekonomi yang memungkinkan para petani, untuk pertama kali, memasarkan hasil bumi ke kawasan lain Thailand. Di pihak lain, jalan itu juga memungkinkan pemerintah di Bangkok menyelenggarakan pelayanan dan pengawasan ke dalam kawasan itu dan menjaga daerah itu terhadap kegiatan gerilya.¹⁴

Sebagian terbesar program bantuan jelas tidak dilaksanakan hanya untuk maksud kemanusiaan semata. Amerika Serikat banyak memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia, menyangkut pertimbangan Indonesia sebagai negara berpenduduk besar, Indonesia juga salah satu pasar ekonomi yang potensial di Asia, atau Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, diharapkan dapat menjadi mitra dalam misi pemberantasan terorisme serta menjadi mitra dalam menjaga hubungan baik AS dengan negara-negara muslim, khususnya Timur Tengah.

Namun meski demikian, tidak semua kebijakan dan komitmen bantuan mempunyai tujuan politis atau keamanan yang segera atau eksklusif. Banyak program

¹⁴ *Ibid*, K.J. Holsti, hal. 9.

bantuan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan, menanggulangi keadaan darurat atau mencegah malapetaka ekonomi tertentu.¹⁵

Sebagaimana telah diungkapkan oleh K.J. Holsti diatas, bahwa bantuan luar negeri pada mulanya lebih diutamakan sebagai kegiatan kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Bantuan Amerika Serikat sebagaimana diungkapkan oleh Duta Besar Amerika, Lyn Pascoe, di Kedubes AS, Kamis 13 Januari 2005, bahwa seluruh bantuan hibah yang diberikan oleh pemerintah Amerika adalah demi komitmen mereka untuk peduli terhadap peristiwa di Aceh, bantuan AS tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, sambil juga membantu demokrasi dan stabilitas Indonesia yang timbul pada suatu titik waktu yang kritis akibat berbagai konflik internal.¹⁶ Bantuan Amerika sendiri dalam memulihkan kondisi Aceh pasca tsunami, sesuai dengan kebutuhan Aceh, terdiri dari bantuan hibah berupa sejumlah dana, makanan, obat-obatan dan sanitasi, guna memenuhi kebutuhan darurat di Aceh setelah terjangan tsunami, kemudian bantuan teknis berupa pengiriman sejumlah tenaga militer dan personel yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, ahli medis dan perawat guna menanggulangi pasien korban tsunami, serta bantuan pinjaman pembangunan berupa pinjaman lunak, guna untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dalam jangka panjang.

¹⁵ K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Erlagga, Jakarta, 1988, hal. 251.

¹⁶ *Ibid*, hal. 11

F. Hipotesis

Peran Amerika dalam membantu dan memulihkan kondisi Aceh pasca tsunami, dilakukan dengan memberikan bantuan hibah berupa sumbangan dana rehabilitasi dan rekontruksi, bantuan teknis, dan pinjaman pembangunan berupa pinjaman lunak.

G. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian perpustakaan (*library research*). Data-data diperoleh melalui berbagai sumber, yakni:

1. Buku-buku ilmiah dari berbagai hasil penelitian
2. Sumber-sumber yang ada di media internet
3. Jurnal, surat kabar, dan majalah

Data dianalisa melalui metode deskriptif, dimana penulis mempergunakan teori sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah dalam karya ilmiah. Setelah dilakukan perumusan argumen utama yang ditarik dari teori, kemudian penulis akan melakukan analisa melalui data-data empirik.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini di buat dalam jangka waktu tahun 2004 hingga tahun 2006, dengan maksud agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih fokus. Dimana tahun 2004 merupakan awal terjadinya peristiwa tsunami 26 Desember 2004,

sedangkan 2006 adalah perkembangan informasi terbaru mengenai bencana tsunami di NAD. Dalam jangka waktu tersebut segala bentuk bantuan Amerika Serikat terhadap Aceh termasuk kedalam jangkauan penelitian. Meskipun demikian, uraian mengenai berbagai peristiwa dan hal-hal yang di luar batasan tersebut, yang masih mempunyai relevansi yang kuat juga akan diutarakan.